

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN
REMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah.**



Disusun oleh:

Rika Ardiyanti

NIM. 1505046038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Rika Ardiyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

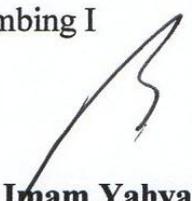
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Rika Ardiyanti
NIM : 1505046038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi
Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap
Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya skripsi ini dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum. Atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

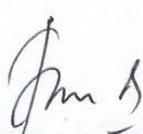
Pembimbing I


Dr. H. Imam Yahya, M.,Ag.

NIP. 197004101995031001

Semarang, 11 Maret 2019

Pembimbing II


Dessy Noor Farieda, M.,Si.

NIP. 197912222015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Rika Ardiyanti
NIM : 1505046038
Judul : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 24 April 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 April 2019

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.

NIP. 198106092007102005

Sekretaris Sidang

Muchammad Fauzi, S.E., M.Si.

NIP. 197302172006041001

Penguji I

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si.

NIP. 197905122005012004



Penguji II

Dr. Muhlis, M.Si.

NIP. 196101171988031002

Pembimbing I

Dr. H. Inam Yahya, M., Ag.

NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

Dessy Noor Farieda, M., Si.

NIP. 197912222015032001

MOTTO

“Kunci hidup bahagia hanya satu, bermanfaat untuk sesama, karena

خيرالناس انفعهم للناس”

“Jika kata Dahlan Iskan “manusia mempunyai jatah gagal”, kenapa tidak kamu habiskan jatah gagalmu?”

“Jika orang lain bisa sukses, kenapa kamu tidak?”

“Please focus your goals and do the best.

Remember! You have to be successful.

Don’t forget to always be sincere and grateful whenever and wherever.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta kesempatan dan keridhoanNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Supardi dan Ibu Sholihati yang selalu menginspirasi, dan mengajarkan saya untuk selalu bersemangat dan bersikap tegas dalam hal apapun, serta selalu mengajarkan saya untuk bersikap tegar, ikhlas, dan bertanggung jawab. Beliau adalah yang selalu mensupport saya baik berbentuk moril maupun materil, yang telah memberikan doa, restu, perhatian, semangat, cinta, kasih sayang, dan telah sabar dalam menunggu terselesaikannya skripsi ini.
2. Keluarga besar saya, Bani H. Maskan yang selalu mensupport, memberikan semangat, dan senantiasa selalu memberikan do'a kepada saya.
3. Seluruh dosen dan guru saya yang telah berjasa begitu besar dalam mendidik saya. Atas bimbingan dan do'a beliau, sehingga pada akhirnya saya dapat melangkah sejauh ini.
4. Kepada Kepala Desa Woro dan seluruh jajaran perangkatnya serta seluruh masyarakat yang telah membantu saya dalam pengambilan data untuk skripsi ini. Khususnya kepada Ibu Dasminah yang senantiasa berjasa membantu saya dalam penyebaran kuesioner. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan dan mengabulkan hajatnya.
5. Kepada teman saya yang selalu membantu dan mensupport saya dalam proses penyusunan skripsi selama ini, yaitu M. Ali Mashuri dan Innur Syafa'atin.
6. Dan kepada seluruh pihak yang belum saya sebutkan, terima kasih telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi informasi dari pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang telah terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2019.

Deklarator,



Rika Ardiyanti

NIM. 1505046038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan sebagai penyediaan informasi dalam skripsi untuk informasi nama orang, judul buku, nama lembaga, dan sebagainya yang seharusnya ditulis dengan huruf Arab, akan tetapi disalin kedalam huruf latin. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dalam informasi, maka perlu ditetapkan transliterasi. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan R.I. menetapkan pedoman transliterasi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Konsonan adalah daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa ada tanda apapun. Akan tetapi apabila terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab ini berupa lambang tanda atau disebut sebagai lambang harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

ك	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Ḍammah</i>	U	U

C. Vokal Diftong

Vokal diftong atau vocal rangkap bahasa Arab adalah lambang yang berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *Kaifa*

هَوَّلَ = *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ... ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ... و	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

أَبِي = *abī*

يَمُوتُ = *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah ini ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Ḍammah* maka transliterasinya menjadi (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang hidup, yaitu yang mendapat harakah sukun, maka dibawa (h).

Contoh:

الحكومية = *al-ḥukūmiyah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* merupakan sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan (◌ْ). Dalam transliterasi, lambang tersebut digunakan untuk melambangkan konsonan ganda.

Contoh:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

الْحَقَّ = *al-ḥaqq*

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di tulis biasa al-baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang ini tidak mengikuti huruf yang mengikutinya, akan tetapi ditulis terpisah dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ = *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبَلَدُ = *al-balad*

ABSTRAK

Rika Ardiyanti (1505046038). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Pembimbing I: Imam Yahya dan Pembimbing II: Dessy Noor Farieda.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mempunyai anggaran khusus untuk desa yang disebut sebagai dana desa. Akan tetapi, banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut, salah satu kecurangan tersebut adalah korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang telah mempunyai hak pilih dan atau telah berumur 17 tahun. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *Purposive Sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Rika Ardiyanti (1505046038). *Impact Of Transparency, Accountability, Community Participation in Village Fund Management to Community Empowerment on Woro Village Kragan Sub-district of Rembang Regency. Supervisor I: Imam Yahya and Supervisor II: Dessy Noor Farieda.*

In 2015, Indonesian government already has a budget for the village. The budget is referred as village funds. However, there was a lot of fraud committed by the village government in managing of village funds, one of the frauds is corruption. Therefore, this study aims to determine the influence of village funds management to the empowerment of the community of Woro Village Kragan Sub-district of Rembang Regency. The type of this research was an quantitative research. The sample in this research is amounted 100 respondents who were the community of Woro Village who had the suffrage or were 17 years old. Sampling technique in this research using purposive sampling technique. Data in this research is collected by questionnaire. The data is processed and analyzed by multiple linear regression analysis with the SPSS programme. The results showed that transparency, accountability, and community participation in village funds management has a positive and significant impact on community empowerment on Woro Village Kragan Sub-district of Rembang Regency.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Community Empowerment.*

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang menguasai semesta alam. Segala daya upaya, rahmat, hidayah, maupun kekuatan hanya dari-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa membimbing ummatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Akuntansi syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat hal-hal yang harus disempurnakan. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, tentu berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selain sebagai Dekan Fakultas, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku dosen wali dan dosen pembimbing I penulis yang senantiasa sabar dalam membimbing dan menghadapi problematika yang penulis alami.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku ketua jurusan Akuntansi Syari'ah dan Warno, S.E.,M.Si. selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syari'ah, serta seluruh staf ahli program studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dessy Noor Farieda, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen program studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

menyalurkan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga, serta mengajarkan akhlak yang tidak ternilai harganya.

6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan perpustakaan institute yang telah bersedia penulis reportkan selama menjadi mahasiswi dan selama pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, khususnya teman-teman kelas AKS A yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya sangat berterimakasih kepada kalian yang selalu menyemangati satu sama lain, yang selalu solid baik dalam suka maupun duka. Saya harap, dimanapun dan kapanpun, kesolidan ini jangan sampai luntur dan persaudaraan ini akan tetap terjalin selamanya.
8. Teman-teman anggota aktif Koperasi Mahasiswa Walisongo dan teman-teman KKN Posko 41 angkatan ke-71 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih karena telah mensupport saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Dan seluruh pihak yang belum tercantum dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan juga saran baik berbentuk moril maupaun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi dan juga ilmu pengetahuan yang telah didapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Maret 2019

Rika Ardiyanti

1505046038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Keuangan Desa	11
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	11
2.1.1.2 Pengertian Keuangan Desa	12
2.1.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
2.1.1.4 Pengertian APBDesa.....	12
2.1.1.5 Jenis APBDesa.....	13
2.1.2 Dana Desa Dana Desa	14
2.1.2.1 Pengertian Dana Desa	14
2.1.2.2 Tujuan Dana Desa	15

2.1.2.3	Karakteristik <i>Good Governance</i> untuk Pengelolaan Dana Desa	15
2.1.3	Transparansi.....	17
2.1.3.1	Pengertian Transparansi	17
2.1.3.2	Karakteristik Transparansi	18
2.1.3.3	Indikator untuk Mengukur Transparansi.....	19
2.1.4	Akuntabilitas.....	20
2.1.4.1	Pengertian Akuntabilitas	20
2.1.4.2	Prinsip-prinsip Akuntabilitas	22
2.1.4.3	Dimensi Akuntabilitas.....	23
2.1.4.4	Indikator Akuntabilitas.....	23
2.1.5	Partisipasi Masyarakat	24
2.1.5.1	Pengertian Partisipasi Masyarakat	24
2.1.5.2	Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat	26
2.1.5.3	Manfaat Penerapan Partisipasi	26
2.1.5.4	Indikator untuk Mengukur Partisipasi.....	27
2.1.6	Pemberdayaan Masyarakat	27
2.1.6.1	Pemberdayaan dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	27
2.1.6.2	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	31
2.1.6.3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	32
2.1.6.4	Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat	33
2.1.6.5	Indikator untuk Pemberdayaan Masyarakat.....	33
2.2	Penelitian Terdahulu	34
2.3	Kerangka Berfikir	38
2.4	Hipotesis Penelitian8	38
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.2	Populasi dan Sampel.....	42
3.2.1	Populasi	42

3.2.2 Sampel	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	44
3.5 Teknik Analisis Data	47
3.5.1 Uji Validitas	47
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	48
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	48
3.5.3.1 Uji Normalitas	48
3.5.3.2 Uji <i>Multikolonieritas</i>	49
3.5.3.3 Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	49
3.5.4 Analisis Regresi.....	50
3.5.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	50
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R^2	51
3.5.4.3 Uji F	52
3.5.4.4 Uji t.....	52
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Woro	53
4.1.2 Struktur Organisasi.....	54
4.1.3 Deskriptif Data Penelitian	55
4.2 Karakteristik Responden.....	56
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	56
4.2.2 Usia Responden	57
4.2.3 Pekerjaan Responden	57
4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	58
4.3.1 Uji Validitas	58
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	61
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.4.1 Uji Normalitas	62
4.4.2 Uji <i>Multikolonieritas</i>	65
4.4.3 Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	67

4.5 Pengujian Hipotesis	69
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	69
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi Adjusted R^2	71
4.5.3 Uji F.....	72
4.5.4 Uji t.....	73
4.6 Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	82
5.3 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	: Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian	44
Tabel 4.1	: Struktur Organisasi Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	55
Tabel 4.2	: Jenis Kelamin Responden	56
Tabel 4.3	: Usia Responden.....	57
Tabel 4.4	: Pekerjaan Responden	58
Tabel 4.5	: Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	59
Tabel 4.6	: Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	60
Tabel 4.7	: Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat.....	60
Tabel 4.8	: Hasil Uji Validitas Variabel Pemberayaan Masyarakat	61
Tabel 4.9	: Hasil Uji Reliabilitas Transparansi	61
Tabel 4.10	: Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas	62
Tabel 4.11	: Hasil Uji Reliabilitas Partisipasi Masyarakat.....	62
Tabel 4.12	: Hasil Uji Reliabilitas Pemberdayaan Masyarakat.....	62
Tabel 4.13	: Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.14	: Hasil Uji <i>Multikolonieritas</i>	66
Tabel 4.15	: Uji <i>Glejser</i>	68
Tabel 4.16	: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4.17	: Koefisien Determinasi Adjusted R^2	72
Tabel 4.18	: Uji Statistik F	72
Tabel 4.19	: Uji Statistik t	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Tabel Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Mulai Tahun2017.....	1
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir Penelitian	38
Gambar 4.1 : Grafik Histogram Uji Normalitas	63
Gambar 4.2 : Grafik Plot Uji Normalitas.....	67
Gambar 4.3 : Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner

Lampiran 3 : Jawaban Responden

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sampai dengan saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan tersebut yang menjadikan negara Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi angka kemiskinan tersebut masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017 menduduki titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 1,18 juta jiwa dari tahun 2016. Meskipun demikian, jumlah masyarakat miskin saat ini masih di atas 28 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah saja, akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan tersebut.¹ Berikut tabel perkembangan kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir:

Gambar 1.1

Tabel Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Mulai Tahun 2007



Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS, 2017. Hal. 1*

Di Indonesia ini, tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Hal tersebut dibuktikan dengan data pada bulan September 2017 yang menyebutkan bahwa kemiskinan di pedesaan sebanyak 13,47 % atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan adalah sebanyak 7,26 % atau secara absolut 10,27 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, karena perbedaan jumlah kemiskinan yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan menunjukkan perbedaan jumlah kemiskinan hingga mencapai 46,15 % lebih tinggi pedesaan. Selanjutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyebutkan bahwa faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Inflasi stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen disebabkan karena pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pada saat hari raya, terutama dalam sektor makanan.
2. Meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 % dari enam bulan terakhir.
3. Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, yang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai dengan menggunakan satu kartu.
 - b. Penyaluran PKH yang terintegritas dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset atau tabungan maupun akses lainnya.
 - c. Reformasi subsidi pangan dan energi yang tepat sasaran.
 - d. Optimalisasi penggunaan dana desa.²

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa desa mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pembangunan bangsa Indonesia ini. Hal tersebut berupa peningkatan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui kebijakan

² Ibid. Kementerian PPN... Hal. 1

pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengalokasikan dana untuk desa. Dana tersebut disebut sebagai dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.³

Sejak awal dialokasikannya dana desa, anggaran untuk dana desa tersebut selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa adalah sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 47 triliun, sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 50 triliun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, dan pada tahun 2019 ini menjadi Rp. 70 triliun.⁴

Dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa tersebut, tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa, diantaranya seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya. Akan tetapi, capaian dan dampak positif tersebut juga membawa permasalahan dan tantangan yang muncul serta menjadi pokok permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut muncul dari adanya anggaran desa yang besar, akan tetapi tidak diiringi dengan adanya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar.

³ Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*, 2017, Hal. 2.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Hasil Dana Desa Sejak 2015*, 07/01/2019.

Pokok permasalahan tersebut adalah banyaknya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh pengelola dana desa yang dalam hal ini adalah perangkat desa bahkan kepala desa. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada November 2018, tercatat sebanyak 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 Miliar.⁵

Permasalahan korupsi tersebut juga terjadi di Kabupaten Rembang. Kasus tersebut berupa penyelewengan dana desa sebesar Rp. 320 juta dengan memalsukan tanda tangan Plt (Pelaksana Tugas) Kecamatan. Tersangka memberikan kesaksian bahwa sebagian dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sebagian untuk pembayaran tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Dalam kasus tersebut, tersangka selaku kepala desa langsung dinonaktifkan dan digantikan dengan kepala desa yang baru untuk memudahkan jalannya kegiatan pelayanan administratif masyarakat desa setempat.⁶

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pengalokasian dana desa yang besar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Tiga dari asas yang diungkapkan oleh Permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan *good governance* menurut *United Nation Development programme* (UNDP), diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.⁷ Oleh karena

5 Ihsanuddin, Ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara Rp. 40,6 Miliar, Kompas.com, 21 November 2018., www.nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar.

6 Tribun Jateng, Kades Diduga Selewengkan Dana Desa, Palsukan Tandatangan Camat, TribunJateng.com, 14 Januari 2018.

7 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi, 2018. Hal. 32-33.

itu, sejalan dengan teori mengenai *good governance* dan asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri, maka peneliti dalam hal ini menggunakan asas dan karakteristik tersebut sebagai variabel dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁸ Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan.⁹

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi dan akuntabilitas tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi, banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.¹⁰ Sehingga desa

8 Jubaedah, dkk, Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PKP2AILAN, 2008. Hal. 57-58.

9 Ibid, Mardiasmo... Hal. 33.

10 Masrizal, Banyak Desa di Agara Belum Pasang Baliho Realisasi ADD 2018, beritakini.co/news/banyak-desa-di-Agara-belum-pasang-baliho-realisasi-add-2018. Diakses 25 April 2019.

dinilai belum memenuhi hak masyarakat, yaitu perolehan informasi mengenai program dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan.

Asas selanjutnya adalah asas partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.¹¹ Dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting dilakukan, keterlibatan tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Akan tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum memahami, bahkan belum mengerti mengenai dana desa.

Berkaitan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Dengan adanya masyarakat yang berdaya, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan.¹² Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan negara.

Dalam pengalokasian dana desa, desa Woro merupakan desa dengan penerimaan dana desa terbanyak di Kabupaten Rembang. Dana desa yang diterima desa Woro pada tahun 2018 tersebut sebanyak Rp. 1.195.921.000,-. Anggaran dana desa yang diterima desa Woro tersebut tidaklah sedikit, akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh desa tersebut adalah masih rendahnya masyarakat miskin, bahkan desa Woro sebagaimana disampaikan oleh

11 Ibid, Mardiasmo... Hal. 32.

12 Erni Tahrir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan *Masyarakat*, Kendari, 2018. Hal. 2.

Kecamatan Kragan adalah desa termiskin di Kecamatan Kragan.¹³ Predikat desa miskin yang diperoleh Desa Woro tersebut menjadikan Desa Woro masuk kedalam zona merah. Selain itu, masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat desa Woro adalah sulitnya penyediaan air bersih yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat sampai dengan saat ini masih sulit untuk mendapatkan sumber air bersih. Sehingga sering terjadi kesenjangan masyarakat yang dihadapi karena masyarakat berebut sumber air bersih.¹⁴

Desa Woro seharusnya tidak menjadi desa yang masuk dalam zona merah jika pengelolaan sumber daya maupun pemberdayaan masyarakatnya bagus. Desa Woro ini merupakan desa yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Kragan. Selain itu, potensi yang dimiliki desa yang beragam, yaitu adanya varietas unggul buah duku, buah durian, dan juga letak demografis desa yang berada di lereng gunung yang menjadikan tanah di desa tersebut subur. Oleh karena itu, dengan alasan di atas tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Woro ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

13 “Moro Woro” Sarana Promosikan Potensi Woro. Rembangkab.go.id, 20 Desember 2018.

14 Nur Fm Rembang, Kemarau Panjang, Prinsip Warga Desa di Rembang ini Terpecah karena Suplai Air, Selasa, 2 Oktober 2018. www.nurfmrembang.com/berita/kemarau-panjang-prinsip-warga-desa.

2. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa bagi perangkat desa dan pengelola dana desa dalam rangka mengevaluasi penggunaan anggaran dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan kedepannya dengan harapan informasi yang berada dalam penelitian ini dapat meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana desa tersebut.

- c. Penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, khususnya untuk bidang akuntansi yang mempunyai fokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- d. Untuk penulis, penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar Strata 1.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Kerangka Teori
- 2.2 Tinjauan Pustaka
- 2.3 Hipotesis Penelitian
- 2.4 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis dan Sumber Data
- 3.2 Populasi dan Sampel
- 3.3 Metode Pengumpulan Data
- 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran
- 3.5 Teknik dan Analisis Data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
- 4.2 Deskriptif Data Penelitian
- 4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- 4.4 Uji Asumsi Klasik
- 4.5 Pengujian Hipotesis
- 4.6 Pembahasan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Keterbatasan Penelitian
- 5.3 Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Keuangan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala Desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

2.1.1.2 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang maupun segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan desa

¹⁵ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yang sifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).¹⁶

2.1.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab dua pasal dua. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Disiplin anggaran¹⁷

2.1.1.4 Pengertian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, APBDesa juga memuat tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi *deficit* atau kekurangan anggaran.¹⁸

APBDesa merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

¹⁶ Chabib Soleh, dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2014, Hal. 6

¹⁷ Peraturan Lengkap Desa. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 575.

¹⁸ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat, tahun 2016. Hal. 27.

baik dalam pemerintahan desa. Tata kelola yang baik tersebut dapat dinilai dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memahami siklus pengelolaan APBDesa dengan baik.

2.1.1.5 Jenis APBDesa

APBDesa ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan pendapatan yang meliputi semua penerimaan kas melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.¹⁹ Pendapatan desa ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendapatan yang ada di desa, seperti: hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat, dan sebagainya.
- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.
- f. Hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Maupun pendapatan lainnya.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang dilakukan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa juga dapat diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, dimana pengeluaran tersebut tidak akan

¹⁹ Ibid. Yuliansyah... Hal. 31.

diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.²⁰

Sedangkan pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional,

²⁰ ibid, Yuliansyah... Hal. 35.

serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.²¹

2.1.2.2 Tujuan Dana Desa

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, memperbaiki kualitas hidup manusia dan/atau masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, maupun dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pada awal adanya anggaran dana desa, dana desa ini difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, penyediaan pusat kesehatan desa, dan sebagainya. Akan tetapi setelah tujuan tersebut tercapai, saat ini pemerintah lebih memfokuskan anggaran dana desa tersebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri maupun potensi dari desa.²²

2.1.2.3 Karakteristik *Good Governance* untuk Pengelolaan Dana Desa

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya

²¹ Direktorat Jenderal perimbangan dan keuangan, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*, 2017, Hal. 2.

²² Ibid. Direktorat Jenderal... Hal. 2.

usaha. World Bank dan UNDP mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.²³

Sedangkan pengertian *good governance* sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya UNDP memberikan delapan karakteristik pelaksanaan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- b. *Rules of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang bersangkutan.
- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.²⁴

²³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Berdasarkan depalan karakteristik *good governance* yang dijelaskan oleh UNDP, terdapat tiga karakteristik yang sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan ketiga karakteristik tersebut sebagai variabel pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi yang berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁵ Sedangkan dalam Islam, transparansi diartikan sebagai *shiddiq* yang berarti kejujuran. Transparansi ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al. An'am (6) :152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَتْ
ذَاتَ قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah

²⁴ Ibid, Mardiasmo... Hal. 32.

²⁵ Jubaedah, dkk, Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PKP2AILAN, 2008. Hal. 57-58.

*kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*²⁶

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” mengandung arti bahwa dalam melakukan hal apapun, Allah mengetahui apa yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, harus selalu berbuat jujur, dimana jujur tersebut merupakan konsep mendasar dari transparansi ini. Selain itu, ayat di atas juga menerangkan bahwa “Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu”. Dalam kondisi dan keadaan apapun, baik dalam masalah hukum dan sebagainya, manusia harus selalu bersikap adil yang dalam hal ini menerangkan jujur, meskipun masalah tersebut menyangkut keluarganya sendiri.

2.1.3.2 Karakteristik Transparansi

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi sebagai berikut:

a. *Informativeness* (informatif)

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

b. *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholder*. Sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

²⁶ Bella Arifianti Pratiwi, Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Reputasi Organisasi terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, Surabaya, 2016. Hal. 19.

c. *Disclosure (Pengungkapan)*

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.²⁷

Jadi, transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.

2.1.3.3 Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Dalam pelaksanaan transparansi ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, karena keuangan atau dana tersebut adalah milik rakyat dimana dana tersebut adalah dana publik yang harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyampaikan

²⁷ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004. Hal. 19.

segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Menurut Kristianten, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.²⁸

Berdasarkan indikator di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.
- c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.²⁹

²⁸ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Hal. 73.

²⁹ Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makasar: Graha Ilmu, 2011. Hal. 89.

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)³⁰. Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat.

³⁰ Ibid, Mardiasmo... Hal. 21.

Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S. Al-Mudatssir : 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”*.³¹

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

³¹Muh. Ashari Assagaf, Pengaruh AKuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, Makassar, 2016. Hal. 24.

- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.³²

2.1.4.3 Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
- b. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
- e. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.³³

2.1.4.4 Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

³²Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011. Hal. 90.

³³Ibid, Alfian... Hal. 57-58.

- a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- b. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang

dikerjakan oleh masyarakat lokal.³⁴ Sedangkan partisipasi menurut UNDP adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.³⁵

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

Konsep partisipasi masyarakat ini juga dijelaskan dalam Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Tanthowi dalam bukunya unsur-unsur manajemen Islam bahwa partisipasi dapat dilakukan salah satunya dengan berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Mujadalah (58) ayat 11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:*

³⁴ Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bebas Partisipasi Masyarakat, Malang: Setara Pers, 2014. Hal. 141.

³⁵ Ibid. Mardiasmo... Hal. 32.

*“Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³⁶

2.1.5.2 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
- b. Kesadaran secara sukarela.
- c. Adanya sikap pro aktif.
- d. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.
- e. Adanya kesepakatan-kesepakatan.³⁷

2.1.5.3 Manfaat Penerapan Partisipasi

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.

³⁶ Rahmat Hidayat, dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPI, 2017. Hal. 18-19.

³⁷ Ibid. Moch Solekhan... Hal. 144.

- d. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.³⁸

2.1.5.4 Indikator Untuk Mengukur Partisipasi

Berdasarkan pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- c. Adanya pengawasan dari masyarakat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.6.1 Pemberdayaan dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum teori pemberdayaan muncul, paradigma modernisme telah mendominasi, baik pada praktik perencanaan maupun pembangunan. Menurut paradigma modernisme yang dijelaskan oleh Sanderson sebagaimana yang dikutip oleh Arif Satria, masalah keterbelakangan suatu masyarakat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, untuk mengatasi masalah tersebut membutuhkan bantuan dari pihak luar. Pihak luar tersebut yang bertugas untuk menata proyek pembangunan dengan sejumlah keyakinan bahwa

³⁸ Ibid. Moch Solekhan... Hal. 144.

model tersebut bersifat universal, sehingga terbebas dari dimensi ruang dan waktu.³⁹

Pada masa lalu, banyak dari para pengambil kebijakan dan juga akademisi yang menganut aliran ini. Contoh kecil yang diterapkan dari mendominasinya aliran ini seperti pencangkakan model koperasi perikanan ke semua wilayah secara homogen, dan juga tidak diakuinya kearifan tradisional untuk pengelolaan sumber daya dalam sistem hukum nasional. Setelah sekian lama dipraktikkan, secara empiris paradigma modernisme menyebabkan ketimpangan dimasyarakat. Sehingga, sebagai kritik terhadap aliran tersebut, mulai berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang lebih memberikan tempat untuk rakyat dalam turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan.⁴⁰

Development secara umum dapat diartikan sebagai pembangunan, yang diartikan sebagai pembangunan tanpa perencanaan. Akan tetapi, dalam pembangunan masyarakat desa yang dilakukan dengan banyak pertimbangan dan perencanaan disebut sebagai *rural development*. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi. Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan masyarakat yang termasuk masyarakat desa tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Campur tangan tersebut dilaksanakan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal.⁴¹

³⁹ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Hal. 127.

⁴⁰ Ibid. Arif... Hal. 127.

⁴¹ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017. Hal. 196.

Dalam paradigma *development* tersebut, wacana pemberdayaan (*empowerment*) mulai tumbuh. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Istilah pemberdayaan muncul sekitar pertengahan tahun 1990-an, yang merupakan isyarat terjadinya perubahan pembangunan.⁴²

Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana komunitas dalam suatu organisasi diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ayat 1 Bab 1 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan dalam Islam, konsep pemberdayaan masyarakat ini diterangkan dalam Qs. Ar-Ra'd (13): 11 yang berbunyi:

⁴² Ibid. Arif Satria... Hal. 128.

⁴³ Rahardjo Asisasmita, Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. H. 132.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ نَهْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَلْيِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ وَأَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ فَلْيِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁴⁴

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kaumNya bahkan jika kaumNya mengalami kemunduran selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka sendiri. Ayat tersebut di atas sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana melalui pemberdayaan, masyarakat dituntut untuk mempunyai inisiatif dan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Sehingga, dengan kemampuan dan inisiatif tersebut mereka dapat membentuk kemampuan pribadi, kreatifitas, daya fikir, dan merubah kehidupannya dengan kemampuan maupun keahlian yang mereka miliki.

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan derajat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang masih tidak mampu untuk melepaskan diri dari keterbelakangan dan atau kemiskinan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan

⁴⁴ M. Indra Maulana, Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, Lampung, 2018. Hal. 59.

memampukan dan memandirikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* mengungkapkan bahwa salah satu unsur yang memegang peran penting dalam organisasi adalah manusia. Sehingga, lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Bina manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas, dan pengembangan kapasitas sistem.
- b. Bina usaha, merupakan upaya yang memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan.
- c. Bina lingkungan, yaitu upaya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang masyarakat melalui penjagaan lingkungan hidup untuk lebih baik.
- d. Bina kelembagaan, Mosher (1969) menyatakan bahwa untuk membangun struktur perdesaan yang progresif dibutuhkan beberapa kelembagaan, yaitu: sarana produksi dan peralatan pertanian, kredit produksi, pemasaran produksi, percobaan atau pengujian lokal, penyuluhan, dan transportasi.⁴⁵

2.1.6.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan pengertian di atas, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk masyarakat menjadi individu yang mandiri, baik mandiri

⁴⁵ Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015. Hal. 222.

dalam kemampuan berfikir, bertindak, maupun dalam pengendalian hal-hal apapun yang mereka inginkan. Kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat ini dapat diterapkan dalam kegiatan sosial sehari-hari, dalam kegiatan ekonomi mereka, dan juga dalam kegiatan politik kemasyarakatan.

2.1.6.3 Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jejaring. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya adalah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sederhana yang dapat dilakukan, seperti pemberian dorongan, pemberian motivasi yang akan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut maupun potensi yang berada di lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Setelah suasana atau iklim berkembang di lingkungan masyarakat, maka penguatan potensi nyata tersebut harus dilakukan, seperti penyediaan masukan (input), maupun pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi mempunyai arti sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan juga eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bukan mempunyai tujuan agar masyarakat menjadi ketergantungan terhadap berbagai program pemberian (*charity*).⁴⁶

2.1.6.4 Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen untuk memperoleh dukungan kebijakan, sosial, dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- b. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- d. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.⁴⁷

2.1.6.5 Indikator untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendorong peran serta masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi

Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong berkembangnya usaha kecil, menengah, koperasi, memberikan modal usaha dengan nisbah bagi hasil yang rendah, memberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha, membekali pengetahuan dan/atau keterampilan yang dibutuhkan, dan juga menyediakan informasi pasar dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan

⁴⁶ Ibid. Totok... Hal. 224.

⁴⁷ Ibid. Totok... Hal. 226.

adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan standar hidup yang lebih sejahtera.

b. Pemberdayaan masyarakat dari segi sosial.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dari segi sosial, diharapkan akan memperkuat ketahanan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat lainnya yang sedang mengalami kesulitan, musibah, bencana, dan sebagainya. Dalam sisi sosial ini, masyarakat dapat menerapkan upaya untuk gotong royong.

c. Pemberdayaan masyarakat dari segi politik.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik sangat penting dilakukan karena era reformasi saat ini sangat mengedepankan demokrasi yang demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi masyarakat kepada wakil-wakil rakyat harus dilaksanakan dengan baik.⁴⁸

Indikator untuk mengukur pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan
- b. Kepercayaan
- c. Wewenang
- d. Tanggungjawab⁴⁹

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali dilaksanakan, terdapat banyak penelitian yang mempunyai topik sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Ibid, Rahardjo Adisasmita... Hal. 134.

⁴⁹ Ibid, Emi Tahrir... Hal. 28.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa oleh Rizky Amalia Sugista pada tahun 2017.	Variabel independen (X): Transparansi, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Variabel dependen (Y) adalah pembangunan Desa	Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dan penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner. Analisis datanya menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistik, yaitu dengan uji t.	Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur	Variabel (X): Alokasi Dana Desa Variabel (Y): Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kesejahteraan	Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Angket tersebut menggunakan instrument skala	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan

Kecamatan Binongko Kab. Wakatobi) oleh Erni Tahrir pada tahun 2018	Masyarakat	likert.	masyarakat desa Jaya Makmur
Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang) oleh Rina Indrawati Syafi'I, Dkk. tahun 2018.	Variabel X: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) Kebijakan Desa (X2) Kelembagaan Desa (X3) Variabel Y nya adalah Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian dilaksanakan di Desa Pundungsari, Tempursari, Lumajang dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji simultan (F), uji determinasi (R ²), dan uji partial (t).	Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan ADD, variabel kebijakan desa, dan variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat pula pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan penduduk.
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi	Penelitian ini adalah penelitian campuran, yaitu	Populasi penelitian ini adalah 19 Desa di Kec. Merapi	Akuntabilitas dan transparansi secara signifikan berpengaruh

<p>terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Oleh Weny Ultafitah tahun 2017.</p>	<p>penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif dengan variabel Independen (X): Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Variabel Dependen (Y) adalah Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Barat, dengan sampel 7 responden per desa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, uji t, uji F, Adjusted R Square, dan Regresi Linier Berganda.</p>	<p>terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat.</p>
<p>Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Variabel X dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program dana desa, sedangkan variabel Y nya</p>	<p>Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat dan penduduk desa di Kecamatan Galesong, dengan</p>	<p>Program Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.</p>

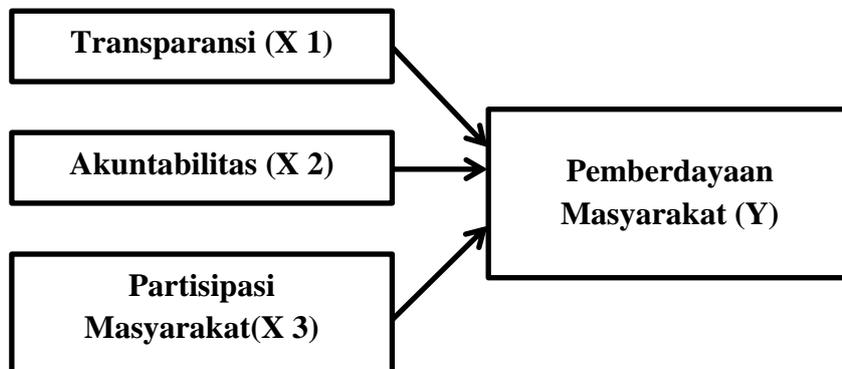
Galesong Utara Kabupaten Takalar oleh H. Dahyar Daraba pada tahun 2017	adalah tingkat partisipasi masyarakat	sampel 3 desa di Kecamatan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear	Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa.
--	---------------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang didasarkan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 **Transparansi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat**

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan

segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Erni Tahrir dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018 membuktikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan indikator transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultafiah pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat juga menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H1: Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2.4.2 Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rina Indrawati Syafi'I, dkk pada tahun 2018

melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2.4.3 Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan juga ide masyarakat dapat tersalurkan dan dipenuhi dengan baik. Selain itu, Rizky Amalia Sugista dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa pada tahun 2017 menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, salah satu upaya untuk pembangunan desa dapat diterapkan dengan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Penelitian yang berbasis kuantitatif ini juga dilaksanakan untuk menguji teori atau dugaan sementara dalam penelitian apakah benar atau tidak.⁵⁰ Selain sebagai penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.⁵¹ Dalam pelaksanaannya, *field research* dilaksanakan dengan menggali data dari lokasi atau lapangan penelitian, yaitu responden yang ada di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Objek dalam penelitian ini adalah Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Sedangkan jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data maupun informasi yang diperoleh langsung dari pelaku atau informan yang relevan. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi lapangan dengan menggunakan kuesioner. Data yang diolah berasal dari pengisian kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Responden yang dimaksud adalah masyarakat desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang telah mempunyai hak pilih dan/atau telah berumur lebih dari 17 tahun. Selain dengan menggunakan kuesioner, peneliti juga menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data primer ini.

⁵⁰ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Perss, 2017. Hal. 2.

⁵¹ Iqbal, Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Hal. 11.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut supomo, populasi adalah sekelompok orang, kejadian, maupun segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode *survey* sebagai teknik pengumpulan data.⁵² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang telah memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun. Penentuan populasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat yang telah berumur 17 tahun telah dianggap dewasa dan telah cakap hukum. Jumlah penduduk Desa Woro yang memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun adalah sebanyak 3447 jiwa.

3.2.2 Sampel

Supomo juga mengemukakan pendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.⁵³ Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Slovin, yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\n &= \frac{3447}{1+3447(0,1)^2} \\&= \frac{3447}{1+3447(0,01)} \\&= \frac{3447}{1+34,47} \\&= \frac{3447}{35,47} = 97,18 \text{ dibulatkan menjadi } 98.\end{aligned}$$

⁵² Supomo N.I., Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen, BPFEE, Yogyakarta: 2014. Hal. 42.

⁵³ Ibid. Supomo... Hal. 43.

Perhitungan jumlah sampel tersebut menggunakan standar error sebanyak 10%.⁵⁴ Hal tersebut dilaksanakan oleh peneliti karena peneliti mampu menunjukkan data yang relevan sebanyak 90%. Penentuan standar error tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti. Selain itu, peneliti menggunakan teknik sampling ini karena terbatasnya tenaga, dan juga tidak memungkinkannya pengambilan data secara keseluruhan, karena populasi dari penelitian ini sangat banyak. Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 98 responden, dan secara pelaksanaan dapat dilaksanakan sebanyak 100 responden. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden (n=100). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan sengaja dengan syarat telah memenuhi segala persyaratan yang telah dibutuhkan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik penyebaran kuesioner. Teknik tersebut dilaksanakan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan menyertakan beberapa alternatif jawaban. Proses pengambilan data ini dilakukan penulis dengan membuat daftar pertanyaan maupun pernyataan yang kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab dengan menggunakan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Kuesioner tersebut disebar untuk diisi oleh responden yang dalam hal ini adalah seluruh masyarakat desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang telah mempunyai hak pilih dan/ atau telah berumur 17 tahun, dengan cara terjun langsung ke desa tersebut dan menemui responden secara langsung. Setelah data telah didapatkan, selanjutnya akan dilaksanakan pengujian validitas, pengujian reliabilitas, maupun uji analisis data.

⁵⁴ Haryadi Sarjono, dan Winda Julianita, *SPSS vs Lisreal: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Hal. 34.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui pengaruh adanya hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, variabel independennya ada tiga, yaitu transparansi dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel dependennya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, operasional variable penelitian dan pengukuran variable dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Transparansi	Prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.	a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan. c. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala interval

		pertanggung-jawaban.	
Akuntabilitas	Pertanggung-jawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	<p>a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.</p> <p>b. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>c. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.</p> <p>d. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.</p>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala interval
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan	<p>a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa.</p> <p>b. Keterlibatan</p>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala interval

	pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.	masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. c. Adanya pengawasan dari masyarakat. d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.	
Pemberdayaan Masyarakat	Upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.	a. Kemampuan b. Kepercayaan c. Wewenang d. Tanggung jawab	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala interval

Dalam hal pengukuran, penelitian ini menggunakan pengukuran skala Interval, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai terhadap preferensi tersebut.⁵⁵ Skala

⁵⁵ Ikhsan, R. L. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2015. Hal. 32.

interval ini menggunakan instrument skala Likert. Kuesioner yang akan disebarakan akan dilengkapi dengan lima alternatif jawaban, dan masing-masing jawaban mengandung skor, yaitu:

STS	: Sangat Tidak Setuju	skor 1
TS	: Tidak Setuju	skor 2
N	: Netral	skor 3
S	: Setuju	skor 4
SS	: Sangat Setuju	skor 5

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan *software* aplikasi SPSS 22.00. Tujuan analisis deskriptif dengan menggunakan statistika ini adalah untuk menginterpretasikan argumen responden terhadap pilihan pernyataan dan distribusi frekuensi dari pernyataan responden berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, jawaban responden diklasifikasi dalam bentuk jawaban dengan menggunakan skala Interval dengan metode skala Likert. Kemudian dari jawaban tersebut yang akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran variabel penelitian dan karakteristik responden yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya. Berikut tahapan yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut:

3.5.1 Uji Validitas

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu dalam mengukur apa yang ingin diukur.⁵⁶ Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

⁵⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013. Hal. 46.

Dalam pelaksanaan uji validitas ini, dilaksanakan dengan melakukan korelasi Item *Correlation* dengan melihat hasil perhitungan pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*. Hal tersebut sama dengan penghitungan menggunakan korelasi *bivariate*, karena keduanya menghitung hal yang sama.⁵⁷ Dalam uji ini, apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel, maka hasil tersebut telah valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah proses olah data yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran data tetap konsisten.⁵⁸ Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, uji reliabilitas ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Secara umum, instrument penelitian dikatakan *reliable* jika mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,6. Jika nilai *Cronbach's Alpha* yang didapat dari masing-masing variabel adalah > 0,6 maka variabel-variabel tersebut dikatakan *reliable*.⁵⁹

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik.

Untuk melihat normalitas residual, analisis grafik ini dilakukan dengan melihat grafik histogram yang

⁵⁷ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013. Hal. 54.

⁵⁸ Ibid, Shofiyah Siregar... Hal. 55.

⁵⁹ Ibid, Imam Ghozali... Hal. 50.

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan analisis statistiknya menggunakan *one sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Normalitas suatu data dapat dilihat jika data terdistribusi dengan normal, yaitu dengan melihat angka *differences* dan juga angka signifikansinya. Jika angka signifikannya lebih dari 5 %, maka model tersebut dikatakan telah normal.⁶⁰

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Oleh karena itu, uji ini penting dilakukan agar tidak terjadi keterkaitan antar variabel independen.

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Semakin kecil nilai dari *tolerance* dan semakin besar nilai dari VIF, maka variabel tersebut semakin mendekati *multikolonieritas*. Dasar dari pelaksanaan uji ini adalah jika nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka variabel independen dalam model regresi tersebut tidak mengandung multikolonieritas.⁶¹

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebalikan dari uji ini adalah *homoskedastisitas*, yaitu terjadi jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Di dalam analisis regresi, model yang tepat dalam

⁶⁰ Ibid, Imam Ghozali... Hal. 160

⁶¹ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 108.

menerangkannya adalah jika tidak terjadi *heteroskedastisitas*, atau model regresi yang terjadi *homoskedastisitas*.

Pelaksanaan uji ini dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada titik-titik dalam grafik *scatter plot* antara ZPRED dan SRESID.⁶²

Selain menggunakan *scatterplot*, dalam pelaksanaan uji *heteroskedastisitas* ini juga menggunakan uji *Glejser*. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 %, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung *heteroskedastisitas*.⁶³

3.5.4 Analisis Regresi

Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas atau penjelas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuan analisis regresi ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.⁶⁴ Dalam pelaksanaan uji ini, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis regresi dimana variabel dependen (Y) dijelaskan dan/atau dihubungkan oleh lebih dari satu variabel independen (X) dengan syarat

⁶² Ibid. Imam Ghozali... Hal. 139.

⁶³ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 143.

⁶⁴ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 95-96.

variabel independen tersebut harus linear. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian ini terdiri lebih dari dua variabel. Rumus yang digunakan untuk analisis ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- e = *error estimated*
- Y = Pemberdayaan Masyarakat
- X_1 = Transparansi
- X_2 = Akuntabilitas
- X_3 = Partisipasi Masyarakat⁶⁵

Besar nilai konstanta dalam model regresi ini tercermin dalam α , sedangkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel ditunjukkan dengan β_1 , β_2 , β_3 . Sebelum menguji kelayakan model regresi ini, dalam penelitian harus melaksanakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan uji normalitas, uji *multikolonieritas*, dan uji *heteroskidastisitas*.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi dilaksanakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dalam variabel dependen. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun, sesuai dengan variabel independen dalam model. Di dalam *adjusted R²* ini juga dapat bernilai negatif, dan apabila *adjusted R²* bernilai negative, maka dianggap bernilai nol. Dalam perhitungan *adjusted R²* ini, apabila standar error yang

⁶⁵ Ibid, Shofian... Hal. 301.

didapat bernilai semakin kecil, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi nilai variabel dependen.⁶⁶

3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang masuk ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji ini adalah dengan menggunakan nilai F dan dengan nilai signifikansi sebesar 5 %, maka model regresi tersebut ditolak dan tidak dapat digunakan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.⁶⁷

3.5.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat apabila jumlah *degree of freedom* dengan derajat kepercayaan bernilai 5%, maka hipotesis tersebut ditolak, dan model regresi tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, nilai signifikansinya harus dibawah 0,05. Selain itu, uji statistik t ini juga dilaksanakan dengan cara membandingkan nilai statistik t hitung yang diperoleh dengan nilai t menurut tabel.⁶⁸

⁶⁶ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 97.

⁶⁷ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 98.

⁶⁸ Ibid. Imam Ghozali... Hal. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Desa Woro

Desa Woro merupakan desa terluas di Kecamatan Kragan, luas desa tersebut adalah 766.123 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.251 orang. Menurut sejarah, nama dari desa Woro ini berasal dari kalimat “aja woro-woro” yang artinya jangan diberitahukan atau jangan memberitahu, karena dahulu desa tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian Putri Subuh dari kerajaan Antah Berantah. Tempat yang digunakan untuk bersembunyi tersebut tepatnya di gunung Tumpang yang terletak di desa Woro.⁶⁹

Secara administratif, sebelah utara desa Woro adalah Desa Sumurtawang, sebelah selatannya adalah desa Terjan, sedangkan sebelah timur desa Woro adalah desa Sumbergayam. Ketiga desa yang berbatasan dengan desa Woro tersebut masuk dalam kecamatan yang sama dengan desa Woro, yaitu kecamatan Kragan. Sedangkan satu desa disebelah barat desa Woro adalah desa Bendo yang masuk dalam kecamatan lain, yaitu kecamatan Sluke.

Desa Woro terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dengan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 22 RT. Mayoritas masyarakat desa Woro memeluk agama Islam, akan tetapi beberapa masyarakat juga memeluk kepercayaan lain, seperti Kristen sebanyak 1 orang, 4 orang menganut kepercayaan Katholik, dan 3 orang masih menganut kepercayaan Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau biasa disebut sebagai agama Kejawen menurut masyarakat setempat.

Desa woro terletak di wilayah yang strategis, yaitu di lereng gunung dengan suhu rata-rata di daerah tersebut adalah 29° C. Oleh karena itu, mata pencaharian terbanyak masyarakat desa Woro adalah

⁶⁹ Kanca Woro, Kancaworo.com. Diakses 26 Februari 2019. 20.30, Kancaworo.com/woro/

petani. Beberapa hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan di desa Woro ini seperti padi, jagung, tomat, cabai, pisang, mangga, pepaya, durian, duku, kedondong, dan cengkeh.

Selain hasil pertanian dan perkebunan desa yang melimpah tersebut, di desa Woro juga terdapat banyak lahan yang dapat dijadikan sebagai wisata, seperti bukit Nganten, air terjun, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah desa Woro diharapkan agar dapat memfasilitasi destinasi tersebut supaya menjadi wisata yang dikenal oleh masyarakat lain. Sehingga, predikat miskin yang disandang desa Woro tersebut dapat dihilangkan dan menambah pencapaian desa maupun pendapatan masyarakat.

Desa Woro ini merupakan desa dengan penerimaan anggaran dana desa terbanyak di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang diperoleh desa Woro adalah sebesar Rp. 1.195.921.000,-. Sedangkan realisasi anggaran dana desa pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.195.903.000,-. Dari keseluruhan anggaran keuangan yang diperoleh desa Woro, pada tahun anggaran 2018 jumlah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) desa tersebut adalah sebesar Rp. 14.555.898. Dana desa yang diperoleh desa Woro pada tahun 2019 masih menjadi yang terbanyak di Kabupaten Rembang, yaitu sebesar Rp. 1.344.832.000,-.

4.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan koordinasi dengan kesatuan perintah yang dapat mencerminkan kegiatan tertentu dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Tugas dan kewajiban yang kompleks dapat dikerjakan dengan baik apabila dilaksanakan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, di desa Woro juga telah diterapkan susunan organisasi yang dijadikan sebagai kerangka untuk memberikan gambaran satu bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan dari tingkat tanggung jawab tertinggi,

hingga terendah. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi ini pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan jelas. Struktur organisasi dari desa Woro ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang

NAMA	JABATAN	NOMOR SK
Rasidan	Kepala Desa	141/1782/2013
Ragil Riwanto	Sekretaris	141/02/2017
Kundhori	Kaur Umum	141/03/2017
Budi Sasmito	Kaur Keuangan	141/03/2017
Nasikin	Kaur Perencanaan	141/04/2017
Supatur	Kasi Pemerintahan	141/05/2017
Marsani	Kasi Kesejahteraan	141/06/2017
Suyanto	Kasi Pelayanan	141/07/2017
Daerobi	Kadus I	141/08/2017
Wiko	Kadus II	141/09/2017

Sumber: Monografi Desa Woro, 2019

4.1.3 Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria peneliti, yaitu masyarakat desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang telah mempunyai hak pilih dan/atau telah berumur 17 tahun lebih. Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan cara menemui responden secara langsung dan memberikannya kepada responden untuk diisi.

Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan respon rate dari responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berkeliling desa dan menemui responden yang telah sesuai dengan karakteristik peneliti sebagaimana dijelaskan

dalam bab sebelumnya, serta mau memberikan pendapat dan/atau mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019. Responden yang diambil dalam hal ini adalah sebanyak 100 responden.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada masyarakat desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
Laki-laki	33	33 %
Perempuan	67	67 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 33 orang, dan responden perempuan sebanyak 67 orang. Artinya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, dimana menurut psikologi perempuan secara umum lebih responsive, lebih rapi, dan tepat sasaran dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan dalam

kuesioner jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa jumlah penduduk Desa Woro yang telah berusia lebih dari 17 tahun lebih banyak perempuan jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

4.2.2 Usia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 4.3
Usia Responden

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
17-30	22	22 %
31-45	49	49 %
46-60	26	26 %
>60	3	3 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada data dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat responden dengan kelompok umur mulai dari 17-30 tahun sebanyak 22 responden, kelompok umur 31-45 tahun sebanyak 49 responden, kelompok umur 46-60 tahun sebanyak 26 responden, dan kelompok yang lebih dari 60 tahun sebanyak 3 responden. Dalam penelitian ini, kelompok umur yang dikatakan produktif telah menjawab pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan usia yang berkisar antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun, yaitu usia sebelum memasuki masa pensiun. Dengan usia yang produktif tersebut, responden dapat menjawab dengan tepat isi dari kuesioner yang telah dibagikan.

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok pekerjaan masyarakat desa Woro adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
Petani	44	44 %
Wiraswasta	27	27 %
PNS	2	2 %
Ibu Rumah Tangga	25	25 %
Mahasiswa	2	2 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini mempunyai pekerjaan sebagai petani sebanyak 44 orang, wiraswasta sebanyak 27 orang, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang, dan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 25 orang, serta 2 responden lainnya berprofesi sebagai mahasiswa. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah petani, karena penduduk desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari kuesioner, untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah:

1. Apabila r hitung $>$ r tabel dengan *degree of freedom* (df) adalah n (jumlah sampel) – 2, maka item kuesioner tersebut valid.

2. Sebaliknya, apabila r hitung $<$ r tabel dengan df adalah $n - 2$, maka item tersebut dikatakan tidak valid.

Dalam pengujian validitas di penelitian ini, H_0 adalah pertanyaan dan atau pernyataan yang telah valid. Oleh karena itu, H_0 diterima jika r hitung $>$ r tabel. Df dihitung dengan $df = 100 - 2 = 98$. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga, r tabel = $r(98;0,05) = 0,165$.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya r hitung, peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan melakukan persamaan item *correlation*, yaitu dengan melihat kolom *corrected item – total correlation*. Dari hasil yang diperoleh dalam kolom tersebut, maka selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan r tabel. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Tranparansi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
T1	15,5300	34,454	,784	,626	,892
T2	15,7800	34,921	,738	,616	,899
T3	15,7900	35,218	,753	,583	,897
T4	15,7000	34,960	,765	,638	,895
T5	15,8500	36,068	,727	,563	,901
T6	15,7000	35,303	,761	,623	,896

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel transparansi, khususnya pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* pada masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel adalah valid.**

Tabel 4.6**Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Item-Total Statistiks**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	9,4700	12,777	,673	,504	,822
A2	9,2300	13,371	,631	,432	,838
A3	9,2600	11,124	,742	,566	,794
A4	9,0900	12,527	,741	,582	,794

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, **semua butir pertanyaan dalam variabel akuntabilitas telah valid**. Hal tersebut dapat diketahui pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* pada masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165.

Tabel 4.7**Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat Item-Total Statistiks**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PM1	17,2400	16,952	,595	,423	,681
PM2	16,4600	18,695	,432	,233	,731
PM3	17,2300	17,815	,566	,427	,691
PM4	16,8000	17,515	,605	,423	,680
PM5	16,1700	20,789	,351	,348	,747
PM6	16,1500	20,715	,382	,386	,739

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel partisipasi masyarakat khususnya pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel ini adalah valid.**

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat
Item-Total Statistiks

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	21,4700	56,292	,280	,133	,912
Y2	22,0600	49,148	,610	,503	,886
Y3	22,0800	48,842	,715	,627	,876
Y4	22,3800	47,814	,766	,620	,871
Y5	22,1800	48,371	,665	,631	,880
Y6	22,2100	47,097	,778	,722	,869
Y7	22,1500	45,482	,765	,620	,870
Y8	22,0100	45,970	,795	,664	,867

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel pemberdayaan masyarakat, khususnya pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* pada masing-masing item pertanyaan didapatkan nilai *r* hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai *r* tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pertanyaan dalam variabel pemberdayaan masyarakat ini adalah valid.**

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan program SPSS. Uji reliabilitas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji *reliable* atau handal tidaknya jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), dimana nilai dari α tersebut tidak boleh lebih dari 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Reliability Statistiks Transparansi

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,912	,913	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Tabel 4.10
Reliability Statistiks Akuntabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,853	,854	4

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Tabel 4.11
Reliability Statistiks Partisipasi Masyarakat

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,749	,746	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Tabel 4.12
Reliability Statistiks Pemberdayaan Masyarakat

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,893	,891	8

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dari tabel hasil uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai α dari variabel transparansi adalah sebesar 0,913, nilai α variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,854, nilai α dari variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,746, dan nilai α dari variabel pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 0,891. Hasil *Cronbach Alpha* dari setiap variabel tersebut telah menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,6. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa **semua variabel dalam penelitian ini telah *reliable*.**

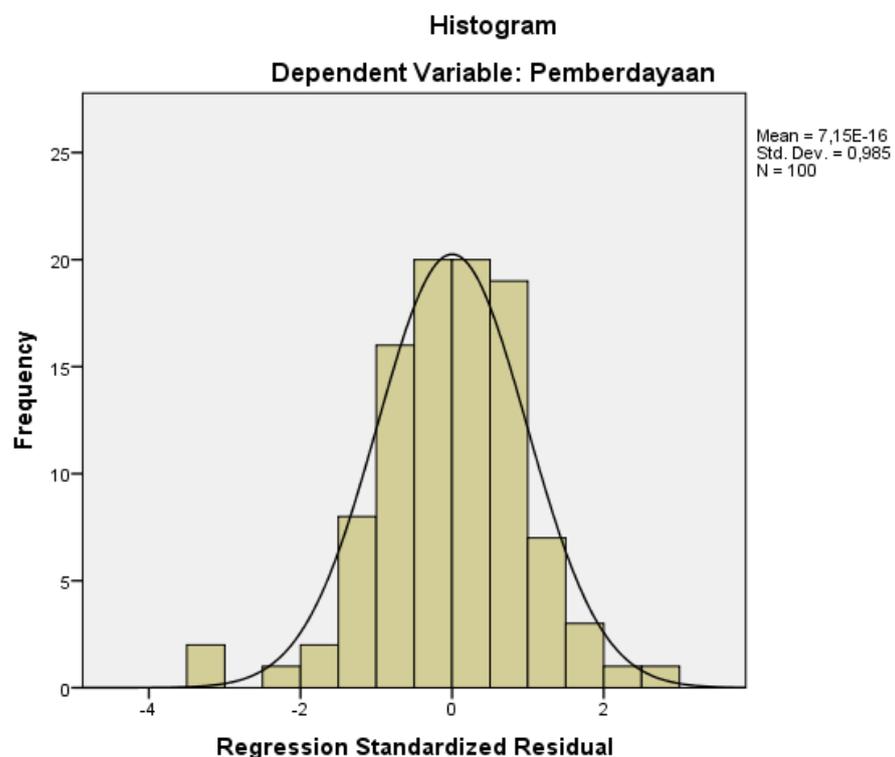
4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual haruslah normal, karena jika

nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

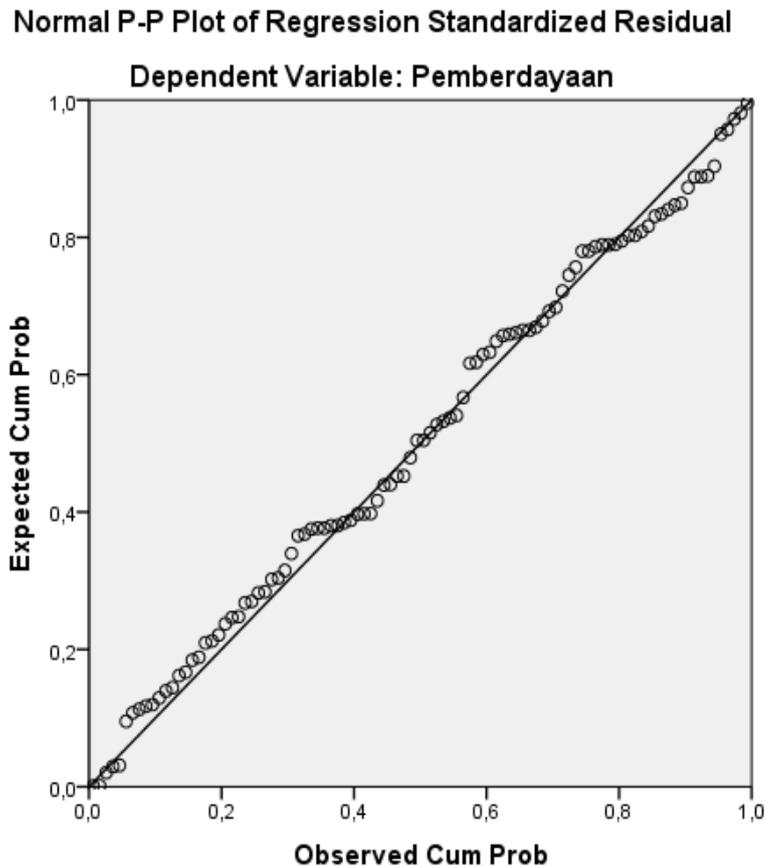
Gambar 4.1
Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Grafik di atas menunjukkan bahwa **distribusi penyebaran residual yang normal**, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini.

Gambar 4.2
Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa **data residual dalam penelitian ini normal**. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya. Sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

Selain dengan menggunakan grafik, uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*, berikut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:

Tabel 4.13
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,00198685
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,047
	Negative	-,054
Test Statistik		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* di atas menunjukkan nilainya sebesar 0,054 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa **data residual telah terdistribusi dengan normal**, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga, untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

Tabel 4.14
Uji *Multikolonieritas*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,494	1,264		1,182	,240		
Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040	,183	5,452
Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000	,225	4,445
Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000	,429	2,329

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil dari uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah $<1,00$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel transparansi sebesar 0,183, variabel akuntabilitas sebesar 0,225, dan variabel partisipasi sebesar 0,429. Sehingga, nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $<1,00$.

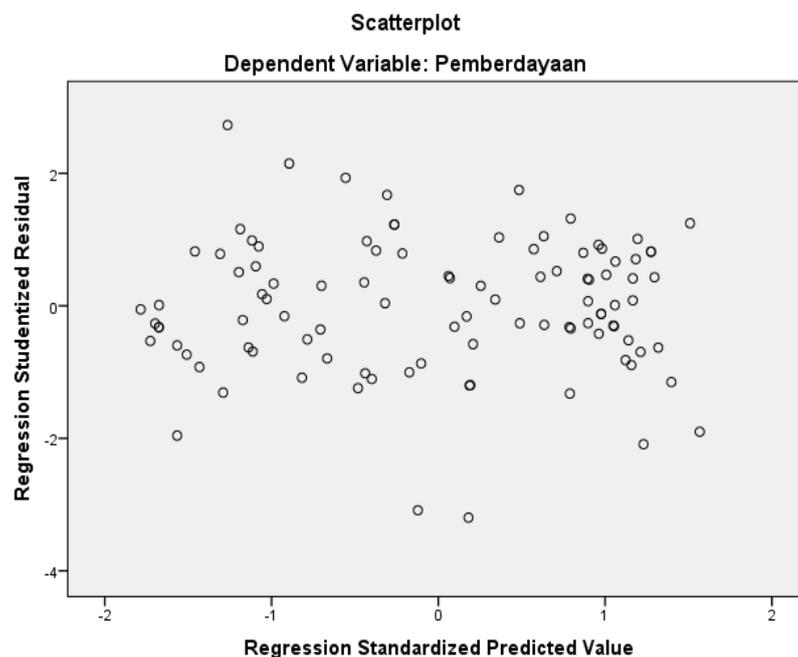
Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 5,452 untuk transparansi, akuntabilitas sebesar 4,445, dan untuk partisipasi masyarakat sebesar 2,329. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus $>0,1$. Sehingga, dapat diambil kesimpulan **bahwa tidak terjadi gejala *multikolonieritas* antar variabel independen dalam penelitian ini.**

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:

Gambar 4.3

Uji *Heteroskedastisitas*



Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil

grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa **tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini**. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan variabel independennya adalah Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* di atas, dalam menentukan *heteroskedastisitas* ini juga menggunakan uji *glejser*. Dalam pelaksanaan uji *glejser* tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.15

Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,142	,766		4,102	,000		
TRANSPARANSI	-,059	,061	-,223	-,962	,338	,183	5,452
AKUNTABILITAS	,161	,085	,396	1,893	,061	,225	4,445
PARTISIPASI	-,084	,056	-,228	1,505	,136	,429	2,329

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Pada *tabel uji glejser* di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,338 untuk variabel transparansi, variabel akuntabilitas sebesar 0,61 dan variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,136. Nilai-nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini harus di atas 0,05. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa **model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas**.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Pengolahan data analisis regresi linear berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS. Hasil yang diperoleh dari proses penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,494	1,264		1,182	,240
	Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040
	Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000
	Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X₁ (transparansi) sebesar 0,211, koefisien variabel bebas X₂ (akuntabilitas) sebesar 0,951, dan koefisien variabel bebas X₃ (partisipasi masyarakat) adalah sebesar 0,400. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,494 + 0,211 X_1 + 0,951 X_2 + 0,400 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Pemberdayaan masyarakat
- X₁ = Transparansi
- X = Akuntabilitas
- X₃ = Partisipasi masyarakat
- e = Standar error

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai koefisien pada variabel transparansi (X₁) adalah sebesar 0,211. Nilai tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan transparansi dalam pengelolaan dana desa sebesar 1 %, maka pemberdayaan akan meningkat sebesar 0,211 %. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan transparansi dalam pengelolaan dana desa sebesar 1 %, maka pemberdayaan masyarakat juga akan mengalami penurunan sebesar 0,211 %. Jadi, **transparansi dalam pengelolaan dana desa ini mempunyai hubungan yang positif dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**. Kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan oleh indikator yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan, dan adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.
2. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X₂) sebesar 0,951. Nilai koefisien regresi tersebut berarti bahwa apabila akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,951 %. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 1 %, maka pemberdayaan masyarakat juga akan mengalami penurunan sebesar 0,951 %.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa **akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**. Kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan oleh indikator yang mempengaruhi variabel pemberdayaan masyarakat, yaitu tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran, adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, dan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

3. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,400. Nilai tersebut mengandung arti bahwa apabila partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,4 %. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebesar 1 %, maka pemberdayaan masyarakat juga akan mengalami penurunan sebesar 0,4 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**. Kenaikan atau penurunan tersebut disebabkan oleh indikator yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, adanya pengawasan dari masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi Adjusted R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925 ^a	,856	,851	3,04853

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pemberdayaan

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, besarnya adjusted R^2 adalah 0,851 atau sebesar 85,1 %. Hal tersebut berarti variasi pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebesar 85,1 %. Sedangkan sisanya yang sebanyak 14,9 % ($100\% - 85,1\% = 14,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model dan/atau di luar variabel dalam penelitian ini.

4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5300,979	3	1766,993	190,131	,000 ^b
	Residual	892,181	96	9,294		
	Total	6193,160	99			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Pada tabel ANOVA atau F test di atas didapat nilai F sebesar 190,131 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain bahwa **transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.**

4.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual atau biasa disebut sebagai uji t merupakan uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji t ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,494	1,264		1,182	,240
Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040
Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000
Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dari hasil pengujian uji t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel transparansi

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat diterima. Dalam

tabel tersebut nilai t hitung adalah sebesar 2,080 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660 dengan nilai signifikannya sebesar 0,04, dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa **terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.**

2. Variabel akuntabilitas

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di terima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,673 dan nilai t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau $<0,05$. Oleh karena itu, **akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.**

3. Variabel partisipasi masyarakat

Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,333 dan nilai t tabel adalah 1,660 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa **partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.**

4.6 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y), maka peneliti telah melaksanakan penelitian

tersebut melalui 100 responden. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 22, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Transparansi (X1) Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pertanyaan yang telah disediakan.

Hasil penelitian mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan informasi-informasi penting yang

berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa maupun informasi lain, karena pemerintah desa Woro tersebut telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan juga pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, maka program pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa.

Selain analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai t hitung dalam variabel transparansi ini sebesar 2,080 sedangkan nilai t tabelnya adalah sebesar 1,660. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,04, dimana syarat statistik yang harus dipenuhi adalah nilai signifikansi tidak boleh lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Penelitian dengan variabel transparansi ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Weny Ultrafiah yang menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, dan dilaksanakan pada tahun 2017.

4.6.2 Pengaruh Akuntabilitas (X2) Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dikuatkan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pemasangan spanduk pengumuman yang berisikan laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan di Balai Desa. Upaya tersebut dilaksanakan pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa, dan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. selain itu, pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan karena memang upaya tersebut merupakan upaya termudah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilaksanakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil nilai t hitung sebesar 6,673 dan nilai t tabel sebesar 1,660. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena besar nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikansi dalam variabel ini juga sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dari suatu variabel tidak boleh lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah desa akan selalu mematuhi prosedur dan hukum, juga akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian dalam variabel akuntabilitas ini juga mendukung penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rina Indrawati Syafi'i, dkk yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2018.

4.6.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat tujuan dari adanya dana desa ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga, partisipasi masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jawaban setuju dalam kuesioner.

Analisis di atas juga dikuatkan dengan hasil uji hipotesis untuk variabel partisipasi masyarakat dengan menggunakan uji statistik dengan nilai t hitung sebesar 4,333 sedangkan nilai t tabel adalah 1,660. Perhitungan tersebut telah memenuhi bahwa nilai t hitung harus lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikansi dari variabel partisipasi masyarakat ini sebesar 0,000. Dimana nilai tersebut juga telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Sehingga, dari hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa akan mendorong hubungan yang positif antara masyarakat desa dan pemerintah desa, karena dengan adanya hal tersebut akan menjadikan pemerintah desa lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk dari upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini seperti dikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian desa, serta gotong royong, dan sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini dapat ditingkatkan lagi agar pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat segera terwujud.

Hasil penelitian di atas juga sejalan dan menguatkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Rizky Amalia Sugista yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan).

4.6.4 Pengaruh Partisipasi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) Dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Hasil uji hipotesis keseluruhan variabel menunjukkan bahwa F hitung pada masing-masing variabel independen $> F$ tabel. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi masyarakat (X3) dalam pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap Pemberdayaan masyarakat (Y).

Hasil penelitian pada transparansi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang telah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan adanya penyediaan segala informasi di papan pengumuman. Pemerintah Desa Woro juga telah akuntabel, yaitu dengan adanya pemasangan spanduk keuangan di Balai desa sebagai upaya pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Selain itu, masyarakat juga telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemberdayaan masyarakat lebih meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel transparansi (X1) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,211 dan nilai signifikansinya sebesar 0,040 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Pentingnya transparansi ini telah disadari oleh pemerintah desa Woro dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Woro, baik yang berhubungan dengan keuangan, maupun non keuangan.
2. Variabel akuntabilitas (X2) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh oleh variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 0,951 dan nilai signifikansi variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pemasangan spanduk anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui besarnya anggaran dan realisasi anggaran desa Woro tersebut.

3. Variabel partisipasi masyarakat (X3) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang diperoleh variabel ini adalah sebesar 0,400 dan nilai signifikansi dari variabel ini adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat bahwa nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Partisipasi masyarakat di Desa Woro ini dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat pada musyawarah-musyawarah desa dan juga pelibatan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan desa Woro tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti merasakan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembagian kuesioner, banyak masyarakat yang tidak mau menjawab pertanyaan kuesioner karena takut akan terjadi sesuatu apabila ia mengisi kuesioner yang telah dibagikan.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengelolaan dana desa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan juga keterbatasan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, peneliti sebaiknya menjelaskan tujuan dan juga sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas kepada masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk mengisi kuesionernya.

2. Variabel dalam penelitian ini juga dapat lebih diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Depok:Rajagrafindo Persada, 2015.
- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makasar: Graha Ilmu, 2011.
- Assagaf, Muh. Ashari, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, Makassar, 2016.
- Atmojo, Muhammad Eko, d. *Efektifitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di desa Bangunjiwo*, 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 2016.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Chomariyah, DKK. *Keuangan Desa Pesisir (Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif*, Malang: Inteligencia Media, 2016.
- Damayanti, Wienda, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Surakarta, 2018.
- Daraba, Dahyar H., *Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.*, 2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, *Dana Desa untuk Kesejahteraan Desa*, 2017.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Hidayat, Rahmat, dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: LPPI, 2017.

- Ihsanuddin, Ada 181 kasus korupsi dana desa, rugikan negara Rp. 40,6 Miliar, *Kompas.com*, 21 November 2018., www.nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar. Pada 02 Januari 2018.
- Ikhsan, R. L. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- Jateng, Tribun, *Kades Diduga Selewengkan Dana Desa, Palsukan Tandatangan Camat*, *TribunJateng.com*, 14 Januari 2018.
- Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2008.
- Karimah, Faizatul, Dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*, Malang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Hasil Dana Desa Sejak 2015*. Tanggal 07 Januari 2019, diakses tanggal 10 Januari 2019.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan*. 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pengelolaan Keuangan Desa. Alokasi Dana Desa*, 2015.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiako, P. S. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet. 2015.
- Masrizal, Banyak Desa di Agara Belum Pasang Baliho Realisasi ADD 2018, beritakini.co/news/banyak-desa-di-Agara-belum-pasang-baliho-realisasi-add-2018. Diakses 25 April 2019.
- Maulana, M. Indra, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, Lampung*, 2018.

- Nurhayati, Dies, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pasuruan, 2017.
- Nur Fm Rembang, *Kemarau Panjang, Prinsip Warga Desa di Rembang ini Terpecah karena Suplai Air*, Selasa, 2 Oktober 2018. www.nurfmrembang.com/berita/kemarau-panjang-prinsip-warga-desa.
- Pemerintah Daerah Rembang. *PERBUP No. 07 tahun 2018 tentang Dana Desa*. 2018.
- Peraturan Lengkap Desa, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pratiwi, Bella Arifianti, *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Reputasi Organisasi terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya*, Surabaya, 2016.
- Qorib, Ahmad, d. I. *Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1. Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, 2016.
- Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
- Sarjono, Haryadi, dan Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Perss, 2017.
- Satria, Arif, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sina, Alfian Ibnu, *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Pada PKB di Ngawi)*, Surakarta, 2017.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Prenadameia Group, 2013.
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Perss, 2014.

- Soleh, Chabib, dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2014.
- Supomo, N. I. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE. 2014.
- Sugista, Rizky Amalia, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan*, 2017.
- Suharyadi, dan Purwanto, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syafi'i, Rina Indrawati, Dkk., *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)*, Malang, 2018.
- Tahrir, Eni, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Kendari, 2018.
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ultafitah, Weny, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*, 2017.
- Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat, tahun 2016.

Lampiran 1

QUESTIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah questioner yang berkaitan dengan penelitian tentang **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”**. Oleh karena itu, disela-sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat mengisi questioner ini. Atas kesediaan dan partisipasi bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi questioner ini, saya sampaikan banyak terima kasih.

Identitas Responden

- Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
a. Petani
b. Nelayan
c. PNS
d. Wiraswasta
e. Lainnya :

Petunjuk Pengisian

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara(i).
2. Pada masing-masing pernyataan, terdapat lima alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sangat setuju (SS) = 5
 - b. Setuju (S) = 4
 - c. Netral (N) = 3

- d. Tidak setuju (TS) = 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) = 1

Daftar Pernyataan

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
Transparansi						
1.	Saya merasa masyarakat selalu diikutsertakan dalam musyawarah rencana pengalokasian dana desa.					
2.	Masyarakat mempunyai akses yang cukup dalam informasi rencana penggunaan dana desa.					
3.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh informasi pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.					
4.	Pengelola dana desa terbuka mengenai seluruh hasil pelaksanaan program desa kepada seluruh masyarakat.					
5.	Tersedia akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik tentang dana desa.					
6.	Saya merasa transparansi pengelolaan dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat.					
Akuntabilitas						
7.	Tahapan pengelolaan dana desa melibatkan seluruh unsur masyarakat.					
8.	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan dan perhatian utama dalam					

	pengalokasian dana desa.					
9.	Masyarakat dapat mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.					
10.	Saya merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					
Partisipasi Masyarakat						
11.	Saya merasa masyarakat Desa Woro selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan dana desa.					
12.	Saya merasa masyarakat Desa Woro bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
13.	Saya merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.					
14.	Saya merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritikan kepada pengelola dana desa.					
15.	Saya bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.					
16.	Saya bersedia menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.					
Pemberdayaan Masyarakat (Y)						
Kemampuan						
17.	Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan					

	masyarakat untuk memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia sebagai pendukung aktivitas.					
Kepercayaan						
18.	Informasi yang diberikan mengenai pengelolaan dana desa dapat saya terima dengan baik bersama masyarakat lainnya.					
19.	Informasi yang diberikan mengenai dana desa dapat ditanggapi serius oleh masyarakat.					
20.	Saya dan juga masyarakat lainnya telah percaya penuh dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa.					
Wewenang						
21.	Saya dan masyarakat lainnya diberikan wewenang dalam menyampaikan aspirasi.					
22.	Saya dan masyarakat lainnya diberikan wewenang dalam membantu mensukseskan program yang diadakan oleh desa.					
Tanggung Jawab						
23.	Seluruh masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan dana desa.					
24.	Tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan					

Lampiran 2

Dokumentasi





34	4	3	5	4	4	5		3	4	4	4		4	4	4	4	4	5		5	4	4	4	5	4	5	4
35	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4		4	5	4	5	5	5		5	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4		3	3	3	4		4	3	3	4	4	4		3	3	3	3	4	4	4	4
37	5	5	4	4	4	4		5	5	4	5		5	4	4	4	5	4		4	4	4	4	4	4	4	4
38	5	4	4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	5	5
39	5	5	4	5	4	4		4	5	4	4		5	5	4	4	5	5		5	5	4	4	4	5	5	5
40	5	5	4	5	4	4		4	5	4	4		5	5	4	4	5	5		5	5	4	4	4	5	5	5
41	4	4	4	4	5	5		4	3	5	4		5	5	2	5	5	5		4	5	5	2	5	4	5	5
42	5	5	5	5	5	5		5	3	3	5		3	5	5	5	5	3		5	4	3	3	5	5	3	3
43	4	4	4	4	3	3		3	4	4	4		3	4	3	4	3	4		3	4	3	4	4	4	3	3
44	4	3	3	3	3	5		3	3	3	3		3	4	3	4	3	4		4	3	4	3	3	3	3	4
45	5	4	4	4	4	3		4	4	4	4		4	4	4	4	4	5		5	4	4	4	4	4	4	4
46	5	5	5	4	4	5		5	4	4	4		5	5	4	4	4	4		5	4	4	4	5	5	5	5
47	4	5	4	4	4	5		4	4	4	4		5	4	5	4	4	4		4	4	4	4	4	4	5	5
48	4	4	4	4	4	4		5	5	5	4		4	4	4	4	4	4		3	4	4	4	4	3	3	3
49	5	5	5	5	4	4		4	4	5	4		3	3	4	4	4	4		4	3	4	3	4	4	5	5
50	5	5	5	5	4	4		4	4	5	4		3	3	4	4	4	4		4	3	4	3	4	4	5	5
51	4	4	3	5	4	4		3	3	4	4		3	4	3	5	5	5		5	5	4	4	1	2	3	5
52	1	1	1	2	3	2		2	2	1	3		2	4	2	1	2	4		3	2	3	3	2	3	1	2
53	4	4	4	4	4	3		3	4	3	5		4	3	3	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
54	3	1	1	1	2	1		1	1	1	2		1	5	1	2	4	3		4	2	2	2	2	2	2	1
55	4	3	2	4	3	5		2	4	4	3		4	4	4	3	5	4		5	5	4	3	3	4	3	4
56	4	1	1	2	3	3		1	5	5	5		1	5	4	1	4	2		3	1	1	5	5	2	5	4
57	1	5	1	5	1	1		5	1	5	5		1	2	2	1	4	2		3	1	1	1	5	5	1	5
58	2	1	5	1	1	4		1	4	4	4		4	1	1	2	4	1		1	5	5	1	1	1	1	4
59	4	1	1	1	5	5		2	5	1	1		1	5	1	1	5	1		1	5	1	1	5	1	1	1
60	2	2	1	5	1	1		1	4	5	1		5	5	1	1	4	5		1	5	5	1	1	1	5	4
61	4	3	2	2	3	4		3	4	5	4		4	3	3	4	4	5		4	4	4	4	2	3	5	5
62	5	5	4	4	4	5		4	4	3	4		4	5	4	5	4	5		4	5	5	4	4	4	5	4
63	2	2	1	2	2	2		2	1	1	1		1	2	2	2	2	2		1	1	1	2	2	2	2	2
64	5	4	4	5	4	5		4	4	5	5		3	5	5	4	5	4		4	4	5	5	4	4	5	5
65	2	3	2	2	3	1		3	2	2	5		1	2	2	2	2	2		3	2	2	2	3	3	2	2
66	2	3	2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
67	5	4	4	4	4	4		3	3	5	4		3	5	5	5	3	4		5	5	4	3	4	3	3	3
68	2	3	5	4	2	4		2	2	3	2		2	3	1	3	1	3		2	3	3	1	2	3	1	3
69	2	3	5	2	2	3		2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	4	2	2	2
70	4	1	4	1	5	5		5	1	1	5		1	5	5	5	1	1		1	5	1	1	1	1	1	4
71	1	1	1	1	2	2		2	2	2	3		3	2	1	1	4	3		3	2	3	2	2	2	4	2
72	2	1	1	1	2	4		4	3	2	2		1	2	1	1	2	4		3	2	2	4	4	3	4	3

73	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1		1	1	3	3	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	2	3	1		1	1	1	1		1	1	1	1	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	1
75	4	4	2	5	1	4		4	4	2	4		2	4	1	4	4	4		2	4	4	2	1	4	4	4	2
76	4	4	4	2	2	4		2	1	4	4		4	2	2	4	1	4		4	2	4	4	4	4	4	2	4
77	4	1	5	5	1	5		1	5	4	5		1	2	2	4	4	3		3	5	2	3	2	1	5	2	
78	5	1	5	2	3	2		2	1	4	5		2	2	1	4	3	2		3	2	3	3	2	2	3	1	
79	3	4	3	4	5	3		2	4	5	3		4	5	4	4	4	5		5	4	4	4	3	4	4	5	
80	1	3	1	1	1	1		1	1	1	1		1	5	3	3	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	
81	1	1	1	1	3	1		1	1	1	1		1	1	1	1	5	5		4	1	1	1	1	1	1	1	
82	4	1	3	1	1	1		2	3	2	2		5	5	2	4	3	5		5	4	3	1	1	2	3	4	
83	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	3	3	5	5		1	1	1	1	1	1	1	1	
84	4	1	2	3	1	1		1	3	1	1		1	5	2	1	4	4		5	3	3	1	2	1	2	3	
85	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	3	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	
86	4	2	2	1	2	2		2	5	5	2		2	3	2	2	4	3		3	5	1	1	4	3	3	1	
87	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	3	3	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	
88	4	4	3	3	4	3		3	3	3	4		4	4	3	3	4	4		4	3	4	3	3	4	4	3	
89	2	1	3	2	2	3		2	2	1	2		1	2	1	4	3	4		3	1	2	1	2	2	1	3	
90	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	
91	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	3	5	5		5	1	1	1	1	1	1	1	
92	5	4	2	2	2	3		1	2	2	3		2	5	2	3	5	5		4	3	3	2	1	1	2	2	
93	4	4	4	4	4	5		1	5	5	2		2	3	2	4	2	4		3	2	4	3	2	4	4	3	
94	4	4	2	2	3	3		1	2	1	3		2	5	2	3	5	4		5	1	2	2	2	2	2	2	
95	2	2	3	4	4	3		2	2	2	2		2	1	4	4	3	4		3	2	2	3	4	4	2	1	
96	4	1	2	2	1	2		2	1	1	3		1	5	1	1	3	5		4	1	2	1	3	1	1	2	
97	2	2	3	4	4	2		3	3	3	3		4	4	2	2	1	2		3	4	3	2	2	3	4	4	
98	5	4	3	3	1	1		4	3	5	3		1	5	1	2	4	5		4	2	3	3	1	1	2	1	
99	2	4	2	2	1	2		3	2	2	2		2	2	2	3	2	2		1	1	2	2	3	4	4	2	
100	2	2	1	2	1	3		3	2	2	2		2	1	2	2	1	1		2	2	3	2	4	4	3	4	

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Data-data yang akan diolah untuk masing-masing variabel diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dalam objek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

4.1.1 Transparansi (X1)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai variabel transparansi didapatkan menggunakan kuesioner dengan jumlah sebanyak 6 pertanyaan. Data dari hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggapan Responden Variabel Transparansi

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
1	16	16 %	19	19 %	4	4 %	37	37 %	24	24 %
2	23	23 %	14	14 %	12	12 %	33	33 %	18	18 %
3	20	20 %	16	16 %	18	18 %	28	28 %	18	18 %
4	16	16 %	23	23 %	10	10 %	30	30 %	21	21 %
5	18	18 %	22	22 %	14	14 %	32	32 %	14	14 %
6	16	16 %	20	20 %	15	15 %	29	29 %	20	20 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

4.1.2 Akuntabilitas (X2)

Hasil penelitian pada variabel independen ke dua, yaitu variabel akuntabilitas, dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Dalam kuesioner tersebut jumlah pertanyaan mengenai variabel ini berjumlah 4 butir pertanyaan. Adapun data mengenai hasil yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
1	20	20 %	24	24 %	19	19 %	23	23 %	14	14 %
2	17	17 %	15	15 %	20	20 %	35	35 %	13	13 %
3	23	23 %	19	19 %	9	9 %	24	24 %	25	25 %
4	14	14 %	17	17 %	14	14 %	39	39 %	16	16 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

4.1.3 Partisipasi Masyarakat (X3)

Hasil penelitian pada variabel independen ke tiga yaitu variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Dalam kuesioner tersebut jumlah pertanyaan mengenai variabel ini berjumlah 6 butir pertanyaan. Adapun data mengenai hasil yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tanggapan Responden Variabel Partisipasi Masyarakat

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
1	25	25 %	23	23 %	14	14 %	26	26 %	12	12 %
2	12	12 %	14	14 %	12	12 %	31	31 %	31	31 %
3	21	21 %	25	25 %	18	18 %	27	27 %	9	9 %
4	15	15 %	15	15 %	18	18 %	38	38 %	14	14 %
5	6	6 %	9	9 %	10	10 %	45	45 %	30	30 %
6	4	4 %	12	12 %	6	6 %	48	48 %	30	30 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian pada variabel dependen yaitu variabel pemberdayaan masyarakat ini diperoleh melalui kuesioner. Dalam kuesioner tersebut jumlah pertanyaan mengenai variabel ini berjumlah 8 butir pertanyaan. Adapun data mengenai hasil yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tanggapan Responden Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Item Pertanyaan	Total STS	%	Total TS	%	Total N	%	Total S	%	Total SS	%
1	8	8 %	6	6 %	17	17 %	41	41 %	28	28 %
2	17	17 %	17	17 %	15	15 %	35	35 %	16	16 %
3	15	15 %	14	14 %	22	22 %	40	40 %	9	9 %

4	20	20 %	20	20 %	22	22 %	32	32 %	6	6 %
5	20	20 %	17	17 %	12	12 %	41	41 %	10	10 %
6	20	20 %	16	16 %	13	13 %	45	45 %	6	6 %
7	20	20 %	19	19 %	17	17 %	22	22 %	22	22 %
8	16	16 %	18	18 %	13	13 %	35	35 %	18	18 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Lampiran 4

Hasil Output SPSS

Uji Validitas Variabel Tranparansi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
T1	15,5300	34,454	,784	,626	,892
T2	15,7800	34,921	,738	,616	,899
T3	15,7900	35,218	,753	,583	,897
T4	15,7000	34,960	,765	,638	,895
T5	15,8500	36,068	,727	,563	,901
T6	15,7000	35,303	,761	,623	,896

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	9,4700	12,777	,673	,504	,822
A2	9,2300	13,371	,631	,432	,838
A3	9,2600	11,124	,742	,566	,794
A4	9,0900	12,527	,741	,582	,794

Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PM1	17,2400	16,952	,595	,423	,681
PM2	16,4600	18,695	,432	,233	,731
PM3	17,2300	17,815	,566	,427	,691
PM4	16,8000	17,515	,605	,423	,680
PM5	16,1700	20,789	,351	,348	,747
PM6	16,1500	20,715	,382	,386	,739

Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	21,4700	56,292	,280	,133	,912
Y2	22,0600	49,148	,610	,503	,886
Y3	22,0800	48,842	,715	,627	,876
Y4	22,3800	47,814	,766	,620	,871
Y5	22,1800	48,371	,665	,631	,880
Y6	22,2100	47,097	,778	,722	,869
Y7	22,1500	45,482	,765	,620	,870
Y8	22,0100	45,970	,795	,664	,867

Uji Reliabilitas Transparansi

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,912	,913	6

Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,853	,854	4

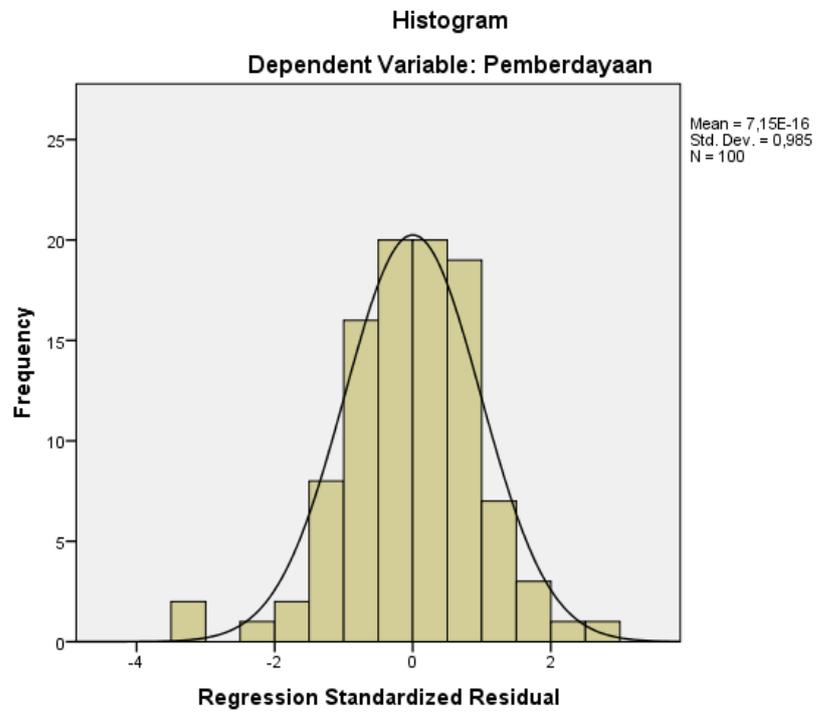
Uji Reliabilitas Partisipasi Masyarakat

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,749	,746	6

Uji Reliabilitas Pemberdayaan Masyarakat

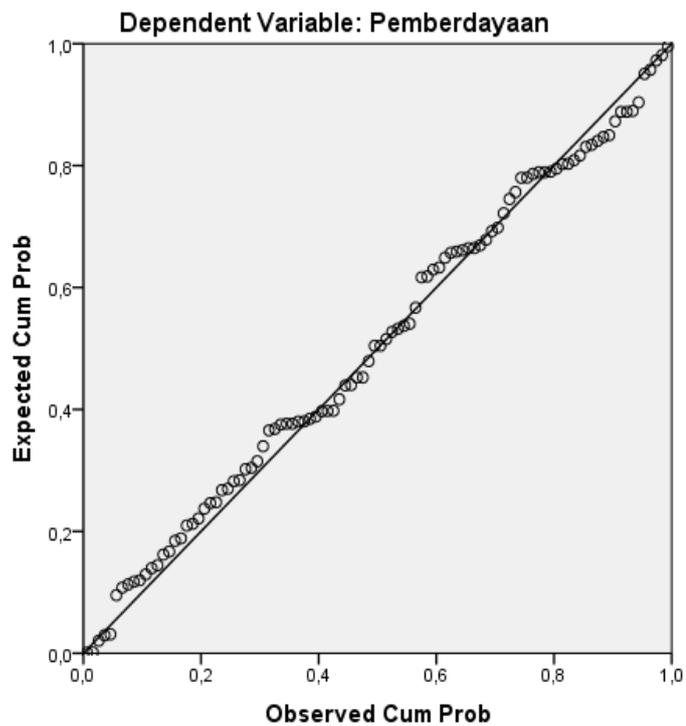
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,893	,891	8

Grafik Histogram Uji Normalitas



Grafik Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,00198685
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,047
	Negative	-,054
Test Statistik		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

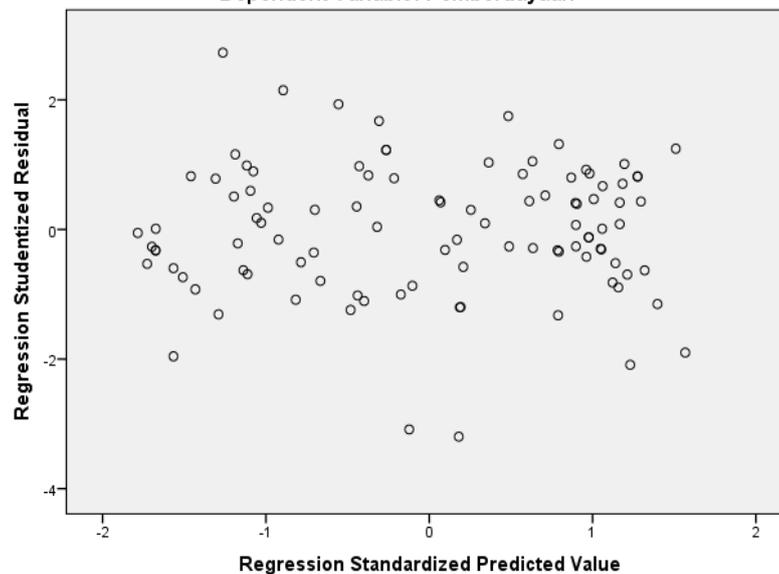
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistik	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,494	1,264		1,182	,240		
Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040	,183	5,452
Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000	,225	4,445
Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000	,429	2,329

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Pemberdayaan



Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	3,142	,766				4,102
TRANSPARANSI	-,059	,061	-,223	-,962	,338	,183	5,452
AKUNTABILITAS	,161	,085	,396	1,893	,061	,225	4,445
PARTISIPASI	-,084	,056	-,228	-1,505	,136	,429	2,329

Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,494	1,264		1,182	,240
Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040
Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000
Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000

Koefisien Determinasi Adjusted R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925 ^a	,856	,851	3,04853

Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5300,979	3	1766,993	190,131	,000 ^b
Residual	892,181	96	9,294		
Total	6193,160	99			

Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,494	1,264		1,182	,240
Transparansi	,211	,101	,188	2,080	,040
Akuntabilitas	,951	,141	,552	6,763	,000
Partisipasi	,400	,092	,256	4,333	,000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rika Ardiyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 1505046038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 24 Januari 1997

Agama : Islam

Alamat : Ds. Sendangmulyo, RT. 003, RW. 002,
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Pendidikan :

1. SDN 01 Sendangmulyo lulus tahun 2008
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nahjatus Sholihin lulus tahun 2011
3. SMK Nahdlatul Ulama Lasem lulus tahun 2014
4. Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.